



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Landasan Hukum.....	5
E. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Kinerja	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya	10
3. Penilaian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran BPKPD Tahun Anggaran 2023.....	39
BAB IV PENUTUP	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah maka dinyatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Simalungun.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah adalah antara lain sebagai berikut :

1 Tugas Pokok.

Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan yang meliputi menyusun,



melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan serta barang milik daerah.

2. Fungsi Pokok.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- b. penetapan upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

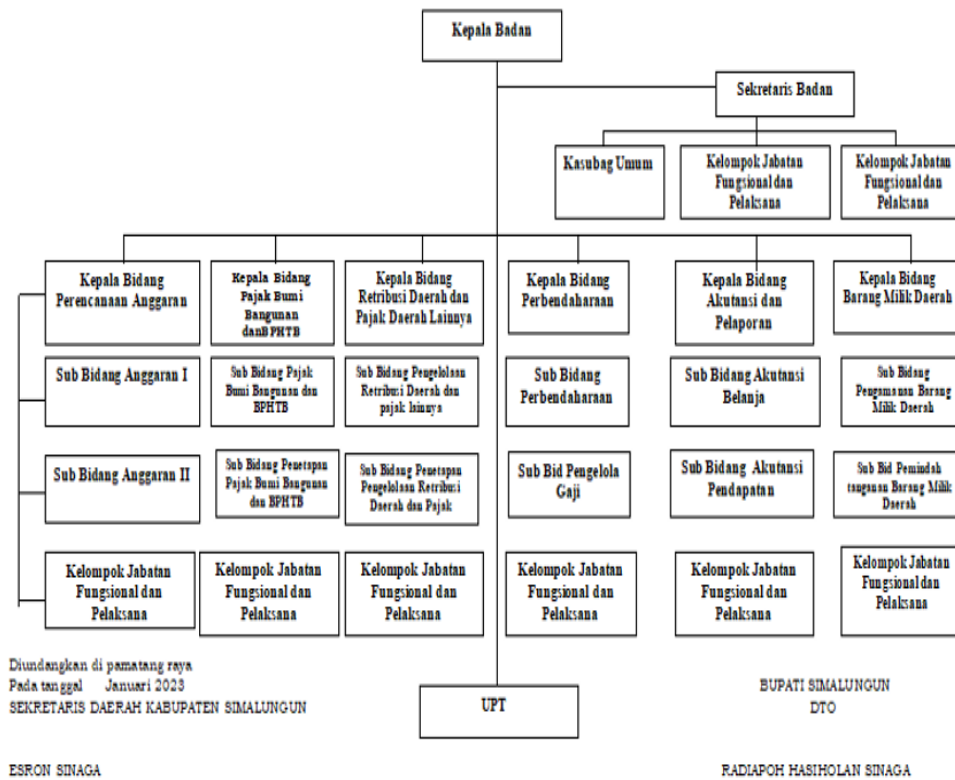


C. Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Simalungun





BPKPD memiliki 32 unit pelaksana teknis daerah yang tersebar pada 32 kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dan handal. Sumber daya manusia BPKPD Kabupaten Simalungun sebanyak 346 orang, yang terdiri dari ASN sebanyak 159 orang dan Tenaga Harian Musiman sebanyak 187 orang. Personil BPKPD dapat dilihat pada foto sebagai berikut :



Gambar 1.2 Foto Pegawai ASN BPKPD Kabupaten Simalungun



Gambar 1.3 Foto bersama Tenaga Harian Musiman BPKPD.



D. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.



E. Isu Strategis

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai *Good dan Clean Governance*.

Isu-isu strategis BPKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPKPD pada Tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

1. Kepatuhan penyusunan anggaran Perangkat Daerah belum sesuai dengan mekanisme dan waktu yang ditentukan.
2. Laporan keuangan Perangkat Daerah masih belum sesuai dengan standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dan BOSP masih perlu ditingkatkan.



4. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
5. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
6. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing OPD.
7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu dilaksanakan.
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak terutama wajib pajak yang belum patuh terus dilakukan melalui uji potensi dan pengawasan di lapangan;
9. Sistem informasi pajak yang terus dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel.

Kemudian dalam rangka untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, diperlukan upaya yang dilakukan yakni:

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah untuk rekonsiliasi SPJ Fungsional.
2. Melakukan sinkronisasi laporan keuangan yang telah disusun oleh Perangkat Daerah secara berkala.
3. Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan yang berlaku.



4. Melakukan penyesuaian Kodefikasi Barang Milik Daerah yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019.
5. Mengembangkan Sistem Aplikasi SIPP AKSI dan SIMBADA yang mengakomodasi penyesuaian kodefikasi baru dan kelembagaan baru.
6. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pendampingan bimbingan teknis untuk aplikasi SIPP AKSI bagi Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pengguna/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
7. Melakukan koordinasi rutin antar bidang di BPKPD untuk mengantisipasi/memetakan permasalahan dan segera mencari solusinya.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Simalungun dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip sesuai motto Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah “SOHEL, Sinergitas, Objektivitas, Handal, Efektif dan Integritas.”



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun disusun dengan langkah-langkah yang sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) yang sejalan dan mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. BPKPD Kabupaten Simalungun melakukan penyelarasan perencanaan dengan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 agar tercipta sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan memiliki visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus. Adapun visi Badan Pengelolaan



Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun bertujuan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Simalungun yaitu **“Rakyat Harus Sejahtera.”**

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun merupakan pencapaian visi tersebut di atas. Kabupaten Simalungun mengusung 10 (sepuluh) misi dalam mewujudkan visi “Rakyat Harus Sejahtera”, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun mengemban tiga (3) misi dari yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
3. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)

Dalam mewujudkan Visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tetap berpijak dengan nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban BPKPD. Setiap pegawai BPKPD akan selalu memegang nilai-nilai dasar dimaksud sebagai motto pegawai BPKPD yaitu **“SOHEI Sinergitas, Objektivitas, Handal, Efektif dan Integritas.”**

2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya (Strategi, Kebijakan dan Program) yang disajikan secara lengkap dalam Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.



Sasaran dan indikator kinerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2022.

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dan Profesional	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran (Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Keuangan dan Aset dengan Baik)
2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Ratio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan, Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures), Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pendapatan yang optimal guna peningkatan pembangunan daerah	meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur yang digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, tolak ukur kinerja aparatur.	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah
4	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Pajak dan Retribusi.
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah	Peningkatan Pajak Daerah	Sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah.



6	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas kemandirian keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Pelaksanaan Diklat dan Sosialisasi terkait Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan Daerah.	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Meningkatkan sarana prasarana aparatur, administrasi perkantoran, kualitas kelembagaan serta kualitas data dan perencanaan.
8	Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan akan sumber daya manusia yang handal dengan mengikuti diklat-diklat fungsional yang diselenggarakan pihak lain maupun dengan menyelenggarakan diklat dilingkungan Kabupaten Simalungun.	Meningkat Kualitas Layanan dan Inovasi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal.

Selanjutnya dalam mencapai suatu tujuan, sasaran dan indikator di atas diperlukan strategi-strategi untuk mencapainya. BPKPD merumuskan strategi yang dilaksanakan dalam pemenuhan tujuan, sasaran dan indikator dimaksud yakni:

1. Melaksanakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, focus group discussion (FGD) dan rekonsiliasi kepada seluruh pemangku keuangan, baik dari kasubbag program (anggaran), bendahara pengeluaran dan penerimaan, pengurus barang maupun pejabat penatausahaan keuangan selaku verifikator keuangan perangkat daerah secara berkala.
2. Menyediakan Sarana Prasarana yang memadai dan dapat mendukung kinerja pegawai BPKPD. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana dimaksud BPKPD telah melakukan inventarisasi asset KIB B Peralatan



dan Mesin terlebih dahulu sehingga dapat diketahui berapa jumlah real kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan komposisi pegawai BPKPD. Selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana kemudian difokuskan kepada pegawai yang tidak memiliki yaitu Kepala UPTD dan seluruh pengurus barang 66 OPD dengan harapan pengurus barang tidak lagi beralasan tidak memiliki laptop dalam pelaksanaan pekerjaannya.

3. BPKPD telah melaksanakan pengelolaan pekerjaannya dengan sistematis melalui aplikasi yang dibangun untuk mempermudah penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPD yang merupakan aplikasi yang ditetapkan Pemerintah kepada seluruh kabupaten/ kota dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran. Selanjutnya untuk penatausahaan keuangan dan pelaporan menggunakan aplikasi FMIS yang dibangun BPKP Perwakilan Sumatera Utara.

Selanjutnya BPKPD dalam mendukung kinerjanya membangun aplikasi yang telah digunakan yaitu :

- a. Aplikasi SOHEI untuk integrasi seluruh pengelolaan pendapatan dan penatausahaan Pajak Daerah;
 - b. Aplikasi *e-retribusi* untuk integrasi seluruh pengelolaan pendapatan dan penatausahaan retribusi daerah;
 - c. Aplikasi SIMBADA untuk penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - d. Aplikasi SIPP AKSI untuk integrasi penatausahaan keuangan dan aset daerah secara real time sebelum ke aplikasi SIMBADA
4. BPKPD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melaksanakan Pendataan ulang objek pajak daerah yang dilakukan bekerja sama dengan Konsultan Jasa Penilai Publik kepada objek pajak yang ditentukan, kemudian melaksanakan pendataan pajak bumi dan bangunan kepada seluruh kecamatan sebagai pilot project. Selain intensifikasi pajak, BPKPD juga telah melakukan penertiban kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dan memiliki tunggakan pajak dengan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.



5. Melaksanakan sosialisasi dan *FGD* kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan stakeholder yang mendukung pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, untuk memastikan pajak dan retribusi tepat sasaran maka dipersiapkan kanal-kanal pembayaran untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun kanal-kanal pembayaran dimaksud yaitu :
 - a. Bank Sumut (ATM, Mobile Banking, Teller, Virtual Account)
 - b. Agen Sumut Link yang tersebar ke seluruh kecamatan Kabupaten Simalungun,
 - c. E-commerce (Tokopedia, Traveloka, Gopay, Ovo)
 - a. Indomaret
 - b. Kantor POS
 - c. QRIS
6. Melaksanakan pengembangan kapasitas pegawai dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan dirinya melalui capacity building, pembentukan team kerja secara berkala, dan mengirimkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, seminar, study tiru dan pengembangan kapasitas diri.
7. Mempersiapkan Sumber daya pegawai pegawai yang handal dan tenaga IT yang mampu mengelola aplikasi BPKPD.
8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan kompetensi diri telah dilaksanakan BPKPD dengan melibatkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaannya.

3. Penilaian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun (pengguna anggaran sebagai entitas pelaporan) dengan Bupati Simalungun. Penetapan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BPKPD Kabupaten Simalungun dalam satu tahun dengan



mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Hal ini dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	92,94%
		Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik.	67,16%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga kesehatan	11,50%
		2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	69,71%
		3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,25%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100%
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA
6	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	95%
8	Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	95%
9	Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah.	95%



Melalui penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di lingkungan BPKPD Kabupaten Simalungun. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran pada tahun 2023. Berdasarkan perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu melalui sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta sumber daya yang tersedia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengukuran kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Strategi BPKPD Kabupaten Simalungun

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daya Serap Anggaran	89,34%	91,12%	92,94%	94,80%	96,70%	98,63%	98,63%
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	52,24%	59,70%	67,16%	74,62%	82,08%	89,55%	89,55%
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga kesehatan	10,51%	11,17%	11,50%	11,84%	12,17%	12,50%	12,50%
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,56	69,71	69,78	69,85	69,93	70	70
5	Opini Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Manajemen Aset	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,81%	4,25%	4%	3,75%	4%	3,25%	3,25%
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Persentase Realisasi PAD	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100,00%
11	Persentase Realisasi Pajak Daerah	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100,00%
12	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100,00%

Dari Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dilakukan penilaian capaian pada setiap indikator kinerja yang diukur dalam setiap triwulan I sampai triwulan IV sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Kinerja per 31 Desember 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	92,94%	92,94%	2,37%	2,37%	92,94%	16,33%	16,33%	92,94%	22,47%	22,47%	92,94%	98,03%	105,48%
		Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik.	74,62%	74,62%	40,00%	40,00%	74,62%	87%	87%	74,62%	90%	90%	74,62%	95%	141%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga kesehatan	11,50%	11,50%	1,46%	1,46%	11,50%	4,72%	4,72%	11,50%	7,00%	7,00%	11,50%	9,58%	9,58%
		2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	69,78	69,71%	6,81%	6,81%	69,78	30,66%	30,66%	69,78	36,72%	36,72%	69,78	75,58%	75,58%
		3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,00%	4,25	9,82%	9,82%	4,00%	14,24%	14,24%	4,00%	14,59%	14,59%	4,00%	4,73%	4,73%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	blm ada opini	blm ada opini	WTP	blm ada opini	blm ada opini	WTP	blm ada opini	blm ada opini	WTP	blm ada opini	blm ada opini
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	56,97%	56,97%	100%	80,03%	80,03%	100%	92,98%	92,98%
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	YA	YA	Ya	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
6	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	75%	75%	100%	85%	85%	100%	100%	100%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	80%	0,00%	0,00%	0,00%	80%	83%	83%	80%	91%	91%	80%	98%	98%
8	Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	80%	0,00%	0,00%	0,00%	80%	83%	83%	80%	91%	91%	80%	98%	98%
9	Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah.	80%	0,00%	0,00%	0,00%	80%	83%	83%	80%	91%	91%	80%	98%	98%



Selanjutnya dari Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dibandingkan dengan penilaian capaian pada setiap indikator kinerja yang diukur dalam setiap triwulan I sampai triwulan IV dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Daya Serap Anggaran	91,12%	89%	98%	92,94%	98,03%	105,48%
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	59,70%	85%	142%	67,16%	95%	141%
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga kesehatan	11,17%	29%	39%	11,50%	10%	120%
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,71%	62%	89%	69,78%	75,58%	108,31%
5	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WDP	WTP	blm ada opini	blm ada opini
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100%	88,93%	98%	100%	92,98%	92,98%
7	Manajemen Aset	YA	YA	YA	YA	YA	YA
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,25%	8,97%	47,38%	4%	4,73%	84,57%
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	85%	85%	100%	100%	100%
10	Persentase Realisasi PAD	75%	83%	110%	80%	98%	123%
11	Persentase Realisasi Pajak Daerah	75%	81%	108%	80%	98%	123%
12	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	75%	95%	127%	80%	98%	123%

Dari Tabel di atas dapat dilihat perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023, hal yang telah melebihi dari target yaitu; Indikator Daya Serap Anggaran, Persentase Perangkat Daerah Yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik, Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan, Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures), Persentase Realisasi PAD, Persentase Realisasi Pajak Daerah, dan Persentase Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, dilaksanakan perbandingan realisasi capaian tahun 2023 dengan target akhir rencana strategis tahun 2026 untuk melihat sudah sejauh mana capaian,



sehingga dapat dilakukan tahapan-tahapan perbaikan untuk mencapai target rencana strategis tahun 2026 dimaksud, perbandingan realisasi capaian tahun 2023 dengan target akhir rencana strategis anggaran tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dengan
Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2026**

No	Indikator	2023			2026
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Daya Serap Anggaran	92,94%	98,03%	105,48%	98,63%
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	67,16%	95%	141%	89,55%
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga kesehatan	11,50%	10%	120%	12,50%
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,78%	75,58%	108,31%	70%
5	Opini Laporan Keuangan	WTP	blm ada opini	blm ada opini	WTP
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100%	92,98%	92,98%	100%
7	Manajemen Aset	YA	YA	YA	YA
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4%	4,73%	84,57%	3,25%
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Realisasi PAD	80%	98%	123%	95%
11	Persentase Realisasi Pajak Daerah	80%	98%	123%	95%
12	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	80%	98%	123%	95%

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi perhatian BPKPD Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan kegiatan demi untuk mencapai rencana strategis akhir tahun 2026 dengan memperhatikan 3 indikator penting, yaitu; Opini Laporan Keuangan, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, dan rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.

Selanjutnya capaian kinerja BPKPD berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan capaian tahun 2023 dapat diuraikan berikut factor penghambat dan factor pendukung kinerja tercapai sebagai berikut:



1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam pemenuhan pencapaian kinerja perlu dilakukan penilaian kerja, baik dan terdapat indikator-indikator penilaian yang ditetapkan yang dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja per 31 Desember 2023.

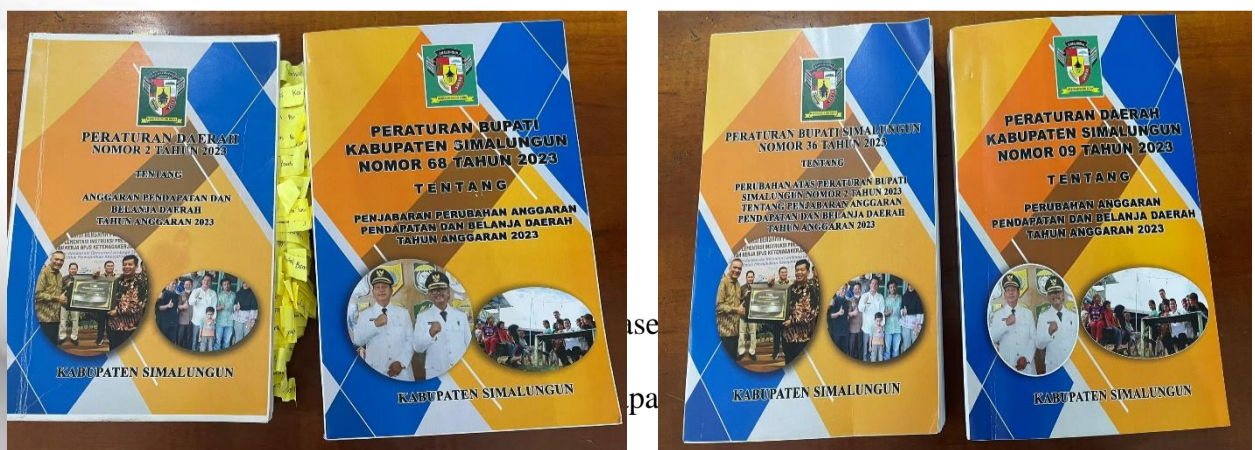
Tabel 3.5

Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	92,94%	92,94%	2,37%	2,37%	92,94%	16,33%	16,33%	92,94%	22,47%	22,47%	92,94%	98,03%	105,48%
		Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik.	67,16%	67,16%	40,00%	40,00%	67,16%	87%	87%	67,16%	90%	90%	67,16%	95%	141,45%

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota dengan indikator kinerja daya serap anggaran dapat dilihat dari table di atas mencapai 98.03% dengan target 92.94%. Keberhasilan kinerja ini dapat tercapai karena BPKPD telah mampu merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dan dapat dicapai dengan rencana kegiatan anggaran yang dihitung secara terinci. DPA dan RKA juga telah disusun dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. APBD Kabupaten Simalungun TA 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Gambar 3.1
Buku APBD TA 2023





disebabkan pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Daerah diselenggarakan dengan jadwal yang telah ditetapkan yakni:

1. Rekonsiliasi BMD antara Pengurus Barang dengan Pejabat penatausahaan keuangan dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun.
2. Rekonsiliasi BMD antara Pengurus Barang Perangkat Daerah dengan Bidang BMD BPKPD dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun.
3. Rekonsiliasi BMD antara bidang BMD BPKPD dengan Bidang akuntansi BPKPD dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.

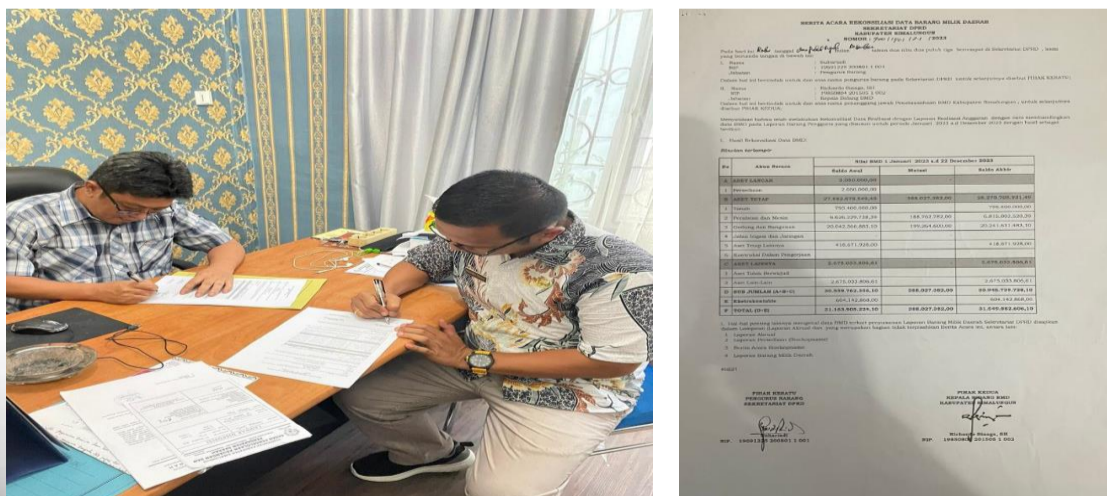
Pelaksanaan rekonsiliasi BMD dapat dilihat dalam tangkapan layar berikut ini:

Gambar 3.2
Rekonsiliasi Pengurus Barang Perangkat Daerah dengan Bidang BMD BPKPD



Pelaksanaan rekonsiliasi yang telah dijadwalkan juga dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi per masing-masing pelaksana rekonsiliasi, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.3
Rekonsiliasi Bidang Akuntansi BPKPD dengan Bidang BMD BPKPD

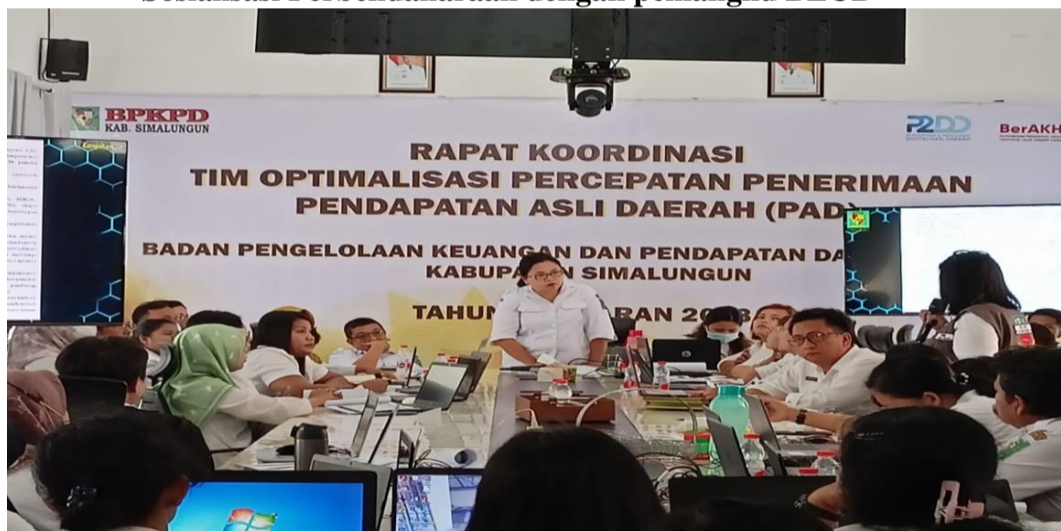




2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

Koordinasi pengelolaan perbendaharaan dilaksanakan dengan melaksanakan rekonsiliasi dan laporan keuangan triwulan dengan stakeholder terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan. Stakeholder yang rutin melaksanakan rekonsiliasi yaitu; Kantor Pajak KPPN Pratama, KPKN Wilayah Pematang Siantar, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, PLN, Dinas Kesehatan dan Dians Pendidikan. Selanjutnya selain rekonsiliasi dilaksanakan juga sosialisasi kepada pemangku keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.4
Sosialisasi Perbendaharaan dengan pemangku BLUD



Gambar 3.5
Sosialisasi Perbendaharaan dengan pemangku BOSP



Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Gambar 3.6

Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga kesehatan	11,50%	11,50%	1,46%	1,46%	11,50%	4,72%	4,72%	11,50%	7,00%	7,00%	11,50%	9,58%	120,04%
		2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	69,78	69,71%	6,81%	6,81%	69,78	30,66%	30,66%	69,78	36,72%	36,72%	69,78%	75,58%	108,31%
		3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,00%	4,25	9,82%	9,82%	4,00%	14,24%	14,24%	4,00%	14,59%	14,59%	4,00%	4,73%	84,57%

Sasaran strategis Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dilaksanakan dengan mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure) dan rasio anggaran sisa terhadap belanja dalam APBD tahun sebelumnya.

Dalam pemenuhan rasio belanja Pemerintah Kabupaten Simalungun sama dengan sebagian besar kabupaten dan kota lainnya masih mengandalkan dana transfer pusat sebagai pendapatannya. Selanjutnya untuk sisa terhadap belanja dalam APBD tahun sebelumnya yaitu 4.73% dengan target 4%. Selisih anggaran dari belanja disebabkan selisih anggaran dengan kondisi real belanja, hal ini dapat terjadi karena proses penyusunan standar satuan harga dilaksanakan sebelum tahun anggaran dan selanjutnya proses realisasi mengikuti harga komoditi pada saat pembelian.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan pemenuhan indicator opini laporan keuangan. Target yang telah ditetapkan adalah Wajar Tanpa Pengecualian



Tabel 3.7
Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	blm ada opini	blm ada opini	WTP	blm ada opini	blm ada opini	WTP	blm ada opini	blm ada opini	WTP	blm ada opini	blm ada opini

Opini laporan keuangan tahun 2022 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini disebabkan oleh adanya temuan BPK terkait kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Simalungun TA 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut :

1. Kekurangan volume atas 26 paket pekerjaan pada empat SKPD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
2. Berdasarkan LHP BPK Nomor 57.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, BPK menemukan bahwa penatausahaan, pencatatan dan penyajian aset tetap kurang memadai. Selama Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berusaha menindaklanjuti hasil rekomendasi LHP BPK dengan menarik aset tetap dari pihak lain, melakukan penelusuran, merinci aset tetap gabungan, mengkapitalisasi pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan dan jasa konsultasi yang dicatat sebagai aset sendiri ke aset induknya, melakukan serah terima aset yang bukan merupakan aset pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Simalungun belum seluruhnya menyelesaikan permasalahan aset tetap, sehingga aset tetap yang disajikan dalam Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp55.239.558.342,11, dengan rincian :
 - a. Masih terdapat permasalahan aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 yang masih dicatat secara gabungan dan tidak dapat dirinci lokasinya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.558.272.473,00; bukti foto-foto dokumentasi belum dapat diyakini atas keberadaan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp24.858.526.284,00; peralatan dan mesin tidak ditemukan keberadaannya pada Puskesmas sebesar Rp613.934.143,26 dan pada RSUD Tuan Rondahaim sebesar Rp709.451.550,03 dan terdapat enam unit kendaraan bermotor yang dikuasai pihak lain sebesar Rp333.325.350,00;
 - b. Masih terdapat permasalahan aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dicatat secara gabungan dan tidak dapat dirinci lokasinya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp452.817.720,00 dan Sekretariat Daerah



sebesar Rp 45.678.600,00; bukti foto-foto dokumentasi belum dapat diyakini atas keberadaan aset tetap lainnya pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp50.402.800,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp20.617.149.421,82;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Simalungun agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dan memproses kelebihan pembayaran di lingkungan satuan kerjanya dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.122.651.987,24;
2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan BMD dan penyelesaian permasalahan aset tetap pada LHP BPK tahun sebelumnya;
3. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
4. Kabid Aset selaku Pengurus Barang Pengelola pada saat melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD dengan SKPD terkait lebih optimal dalam menjamin kelengkapan dan keandalan informasi BMD;
5. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian BMD yang ada dalam penguasaannya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Gambar 3.7

Buku Capaian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.





4. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah diukur dengan indikator kinerja deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD dengan target 100%. Namun dengan perhitungan standar satuan harga terdapat selisih yang mengakibatkan capaian 92.89% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.8

Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	56,97%	56,97%	100%	80,03%	80,03%	100%	92,98%	92,98%

Pemahaman dan penyelarasan program dan kegiatan telah dilaksanakan selanjutnya untuk lebih memantapkan kegiatan sosialisasi untuk penyatuan persepsi juga telah dilaksanakan, namun luas wilayah dan jarak antar kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun menyebabkan terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyusunan standar satuan harga dapat diperlihatkan pada gambar berikut :



Gambar 3.8 Sosialisasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah TA 2023

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran strategis pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja manajemen asset dan target kinerja ya telah mencapai realisasi dan capaian YA, dapat dilihat pada table berikut:



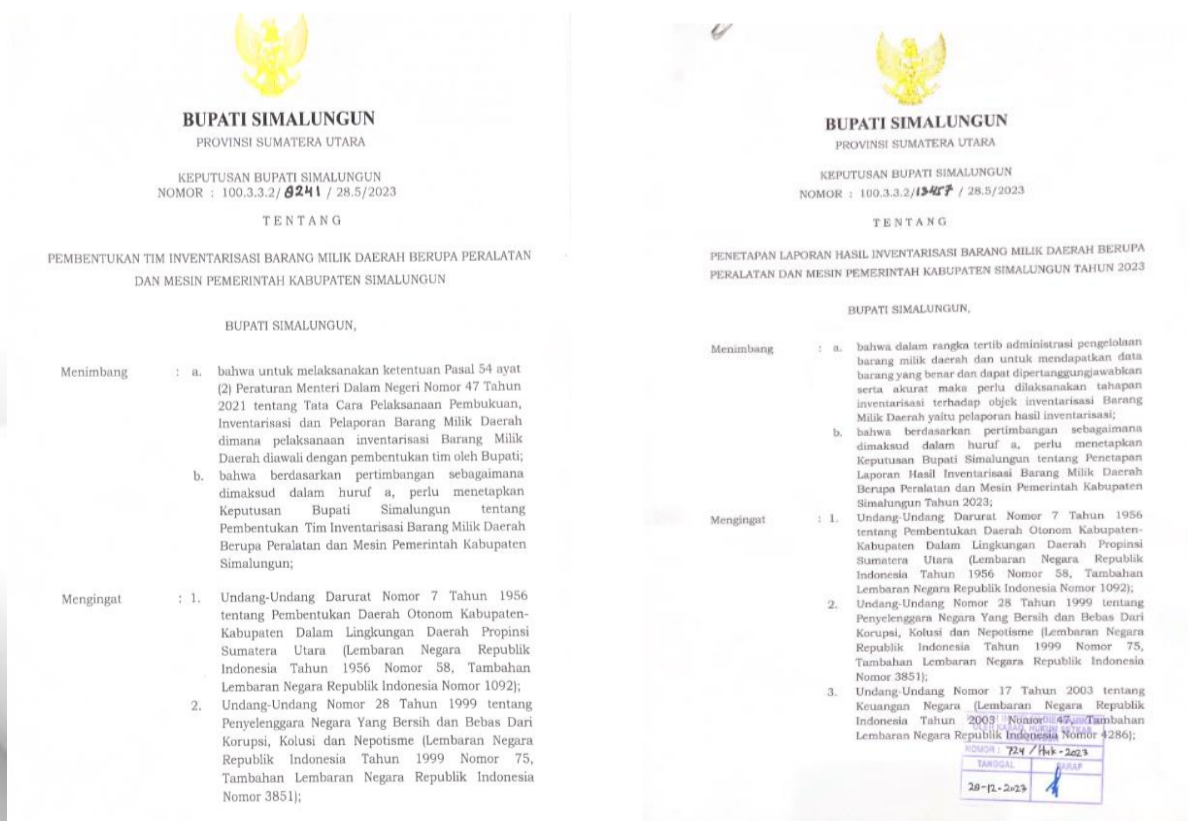
Tabel 3.9
Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	YA	YA	Ya	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA

Progress yang dilakukan selain rekonsiliasi yang terjadwal dan sesuai ketentuan juga dilaksanakan Inventarisasi Peralatan Mesin KIB B untuk seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Inventarisasi Peralatan Mesin KIB B telah dilaksanakan dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/8241/28.5/2023 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Simalungun dan hasil pelaksanaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/13457/28.5/2023 tentang Penetapan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 tanggal 28 September 2023.

Gambar 3.9
Inventarisasi Peralatan Mesin KIB B





6. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah dengan indicator kinerja informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah ditetapkan dengan target 100% dapat dilihat pada tabel berikut :

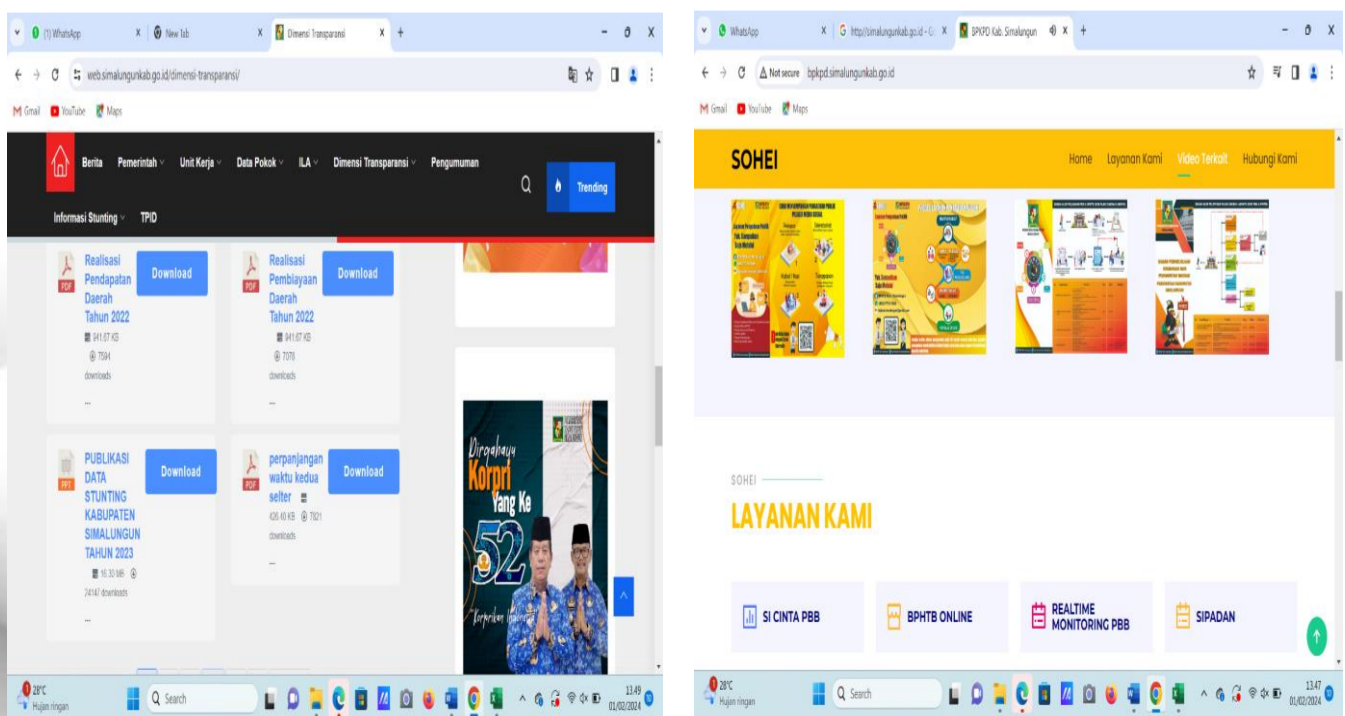
Tabel 3.10

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	75%	75%	100%	85%	85%	100%	100%	100%

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan akses public terhadap informasi keuangan daerah telah dilaksanakan secara online dengan mengakses www.simalungkab.go.id dan untuk informasi pajak dan retribusi daerah dapat diakses pada <http://bpkpd.simalungkab.go.id/>. Tangkapan gambar website dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.10
Screenshoot Gambar Website Informasi Keuangan Daerah





7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah dengan target 80% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 98%.

Gambar 3.11

Tangkapan Layar Realisasi melalui website



Tabel 3.11

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	80%	0,00%	0,00%	0,00%	80%	83%	83%	80%	91%	91%	80%	98%	123%

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat sesuai target yang diharapkan karena dukungan dari Bupati Simalungun yang selalu mengevaluasi dan monitoring progress pengelolaan pendapatan asli daerah. Bupati Simalungun melalui Keputusan Bupati Simalungun membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang senantiasa bekerja di lapangan dalam menjangkau wajib pajak. Selanjutnya Bupati Simalungun melalui Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar melakukan digitalisasi kepada wajib pajak dan retribusi pajak daerah melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).



Tangkapan layar di bawah ini akan memperlihatkan dukungan dari Bupati Simalungun sebagai berikut:

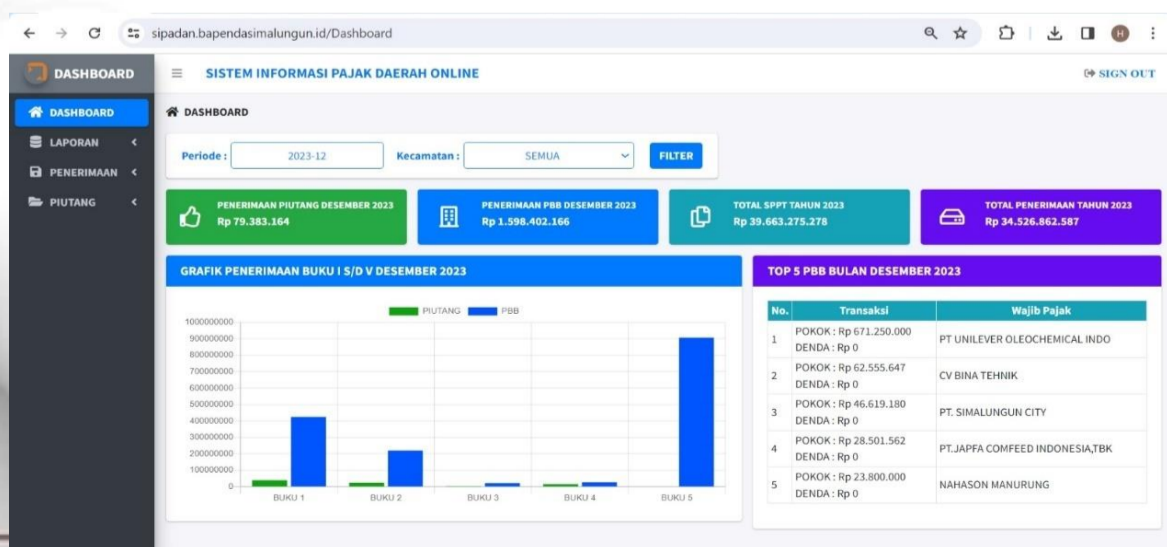
Gambar 3.12
Tangkapan Layar High Level Meeting Terkait Pilot Project PBB-P2



8. Peningkatan Pajak Daerah

Peningkatan Pajak daerah dengan indicator meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan target 80% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 98%.

Gambar 3.13
Tangkapan Layar Realisasi melalui Website





Realisasi capaian 98% dapat di capai oleh BPKPD berkat kerja keras dari seluruh sumber daya manusia BPKPD dimulai dari pelaksanaan pendataan, penagihan hingga pelaporan pajak dan retribusi daerah. Pendataan yang dilakukan juga hingga melibatkan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang menilai kembali potensi wajib pajak. Penagihan dilakukan bukan hanya melalui UPTD seluruh kecamatan (manual) namun juga melibatkan kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPKPD Kabupaten Simalungun. Pelaporan juga dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang telah dibangun oleh BPKPD Kabupaten Simalungun yang telah secara host to host dengan Bank Sumut sebagai Bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Kinerja BPKPD dalam peningkatan pajak daerah dapat dilihat dalam tangkapan layar dan telah di publis melalui sosial media Facebook dan Instagram BPKPD Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

Gambar 3.14
Tangkapan Layar Peningkatan Pajak Daerah





Tabel 3.12
Peningkatan Pajak Daerah

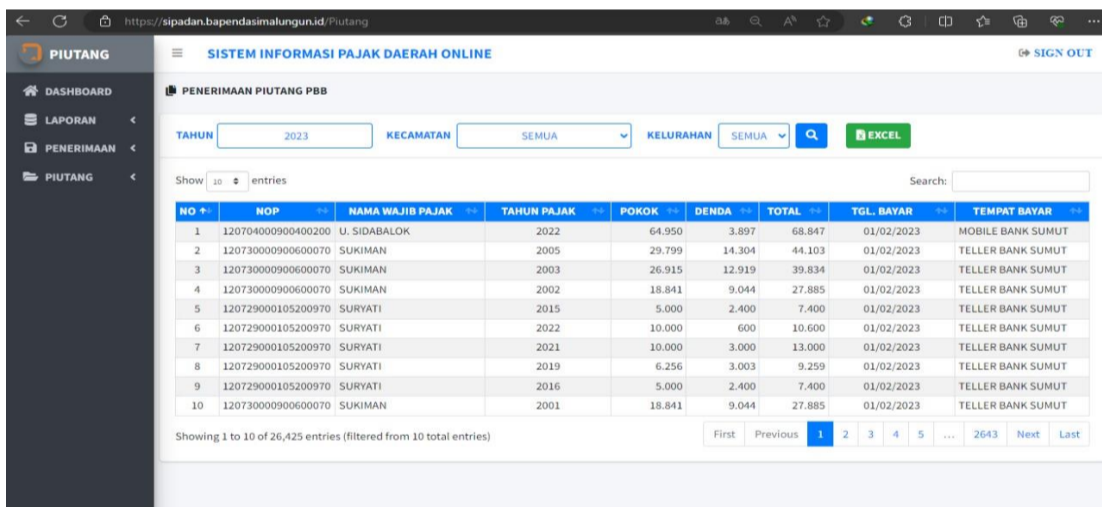
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	80%	0,00%	0,00%	0,00%	80%	83%	83%	80%	91%	91%	80%	98%	123%

9. Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi

Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dengan indicator terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dengan target 80% dan realiasasi capaian tahun 2023 sebesar 98%.

Gambar 3.7

Tangkapan Layar Realisasi melalui website





Dari gambar di atas, dapat diambil kesimpulan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi telah dilaksanakan kegiatan dengan berbagai pihak, diantaranya melalui Surat Kuasa Khusus dengan Kejaksaan Negeri Simalungun, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.15
Tangkapan Layar Surat Kuasa Khusus



Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi didukung dengan indikator kinerja terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena ASN yang bertugas dalam pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah secara berkesinambungan dilibatkan dalam perbaikan system yang didukung oleh aplikasi Pajak dan Retribusi daerah, pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, capacity building maupun focus grup discussion (FGD) sehingga setiap pegawai yang bertugas dapat berinovasi dan mengembangkan diri untuk melaksanakan tugas yang diemban kepada masing-masing individu.



Selanjutnya penggunaan aplikasi yang memungkinkan ASN mampu mengelola pekerjaan yang diampunya dan juga membantu masyarakat dalam kemudahan pembayaran pajak daerah secara tepat dan *realtime* juga membantu pegawai dalam mencapai target kinerja.

Gambar 3.16

Sosialisasi Percepatan Pajak Bumi Dan Bangunan



Capaian kinerja peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dengan indikator kinerja terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah tahun 2023 mencapai 123% dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.14
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN 2023											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah.	80%	0,00%	0,00%	0,00%	80%	83%	83%	80%	91%	91%	80%	98%	123%



B. Realisasi Anggran BPKPD Tahun Anggaran 2023

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun. Berikut tabel realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023.

Tabel 3.15

Realisasi Anggran BPKPD Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan	Per 31 <u>Desember 2023</u>		
		Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	91.514.257.547	87.218.416.269	95,31%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	501.673.878.576	495.489.546.524	98,77%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.597.441.900	2.909.208.958	80,87%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.019.593.200	2.392.272.860	79,23%
	JUMLAH	599.805.171.223	588.009.444.611	98,03%

Anggaran belanja dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2023 per 31 Desember 2023 dengan anggaran Rp.599.805.171.223,00 dengan realisasi sebesar Rp.588.009.444.611 atau (98.03%). Adapun penjabaran teknis mengenai program dan sub kegiatan sasaran belanja langsung tercantum dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023. Program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel. 3.16

Rincian Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.224.831.000,00	2.066.355.658,00	-158.475.342,00	92,88
5.5.02.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.224.831.000,00	2.066.355.658,00	-158.475.342,00	92,88
5.5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.702.704.480,00	30.307.944.147,00	-394.760.333,00	98,71
5.5.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.844.904.480,00	27.628.344.147,00	-216.560.333,00	99,22
5.5.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.857.800.000,00	2.679.600.000,00	-178.200.000,00	93,76



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.368.460.000,00	1.698.431.900,00	-670.028.100,00	71,71
5.5.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	889.460.000,00	537.530.710,00	-351.929.290,00	60,43
5.5.02.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.241.000.000,00	956.088.240,00	-284.911.760,00	77,04
5.5.02.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.000.000,00	204.812.950,00	-33.187.050,00	86,06
5.5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	501.673.878.576,00	495.489.546.524,00	-6.184.332.052,00	98,77



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.359.167.400,00	1.033.446.322,00	-325.721.078,00	76,04
5.5.02.02.2.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.754.000,00	36.269.250,00	-14.484.750,00	71,46
5.5.02.02.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	51.717.000,00	35.358.946,00	-16.358.054,00	68,37
5.5.02.02.2.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	9.984.000,00	8.673.818,00	-1.310.182,00	86,88
5.5.02.02.2.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	508.583.000,00	387.650.992,00	-120.932.008,00	76,22



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.02.2.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	601.365.000,00	464.554.263,00	-136.810.737,00	77,25
5.5.02.02.2.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	136.764.400,00	100.939.053,00	-35.825.347,00	73,81
5.5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.140.078.200,00	925.742.663,00	-214.335.537,00	81,2
5.5.02.02.2.02.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.791.900,00	7.503.600,00	-24.288.300,00	23,6
5.5.02.02.2.02.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	178.451.500,00	141.863.413,00	-36.588.087,00	79,5



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.02.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	423.008.000,00	376.762.250,00	-46.245.750,00	89,07
5.5.02.02.2.02.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	506.826.800,00	399.613.400,00	-107.213.400,00	78,85
5.5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.040.324.670,00	923.570.613,00	-116.754.057,00	88,78
5.5.02.02.2.03.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	147.449.650,00	120.574.500,00	-26.875.150,00	81,77



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.02.2.03.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	254.323.000,00	226.884.320,00	-27.438.680,00	89,21
5.5.02.02.2.03.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	450.080.770,00	415.752.755,00	-34.328.015,00	92,37
5.5.02.02.2.03.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	179.561.000,00	157.015.038,00	-22.545.962,00	87,44



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.02.2.03.006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.260.250,00	2.304.000,00	-1.956.250,00	54,08
5.5.02.02.2.03.007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.650.000,00	1.040.000,00	-3.610.000,00	22,37
5.5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	498.134.308.306,00	492.606.786.926,00	-5.527.521.380,00	98,89
5.5.02.02.2.04.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	82.058.900,00	9.973.000,00	-72.085.900,00	12,15
5.5.02.02.2.04.010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	498.052.249.406,00	492.596.813.926,00	-5.455.435.480,00	98,90
5.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.597.441.900,00	2.909.208.958,00	-688.232.942,00	80,87



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.597.441.900,00	2.909.208.958,00	-688.232.942,00	80,87
5.5.02.03.2.01.001	Penyusunan Standar Harga	224.839.000,00	177.500.175,00	-47.338.825,00	78,95
5.5.02.03.2.01.004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.672.400,00	0	-45.672.400,00	0
5.5.02.03.2.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	782.964.800,00	666.945.573,00	-116.019.227,00	85,18
5.5.02.03.2.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	18.447.000,00	11.200.000,00	-7.247.000,00	60,71
5.5.02.03.2.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.707.114.200,00	1.633.257.410,00	-73.856.790,00	95,67
5.5.02.03.2.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	385.303.000,00	124.968.800,00	-260.334.200,00	32,43
5.5.02.03.2.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.956.500,00	0	-7.956.500,00	0
5.5.02.03.2.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11.985.600,00	0	-11.985.600,00	0



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.03.2.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	77.084.000,00	54.971.600,00	-22.112.400,00	71,31
5.5.02.03.2.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	163.725.400,00	83.315.400,00	-80.410.000,00	50,89
5.5.02.03.2.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	172.350.000,00	157.050.000,00	-15.300.000,00	91,12
5.5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.019.593.200,00	2.392.272.860,00	-627.320.340,00	79,23
5.5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.019.593.200,00	2.392.272.860,00	-627.320.340,00	79,23
5.5.02.04.2.01.001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	142.120.000,00	131.000.000,00	-11.120.000,00	92,18
5.5.02.04.2.01.002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	267.027.000,00	244.746.450,00	-22.280.550,00	91,66
5.5.02.04.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	458.824.000,00	352.046.675,00	-106.777.325,00	76,73



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02	KEUANGAN	599.805.171.223,00	588.009.444.611,00	-11.795.726.612,00	98,03
5.5.02.00	Non Program	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0,00	0,00	0
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.514.257.547,00	87.218.416.269,00	-4.295.841.278,00	95,31
5.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.732.500,00	234.150.530,00	-105.581.970,00	68,92
5.5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.405.600,00	41.371.000,00	-26.034.600,00	61,38
5.5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.962.500,00	47.927.530,00	-7.034.970,00	87,2
5.5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.821.900,00	42.278.000,00	-14.543.900,00	74,4
5.5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.843.900,00	16.154.000,00	-21.689.900,00	42,69
5.5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.658.000,00	21.526.000,00	-8.132.000,00	72,58
5.5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.855.000,00	45.844.000,00	-13.011.000,00	77,89
5.5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.185.600,00	19.050.000,00	-15.135.600,00	55,73
5.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.627.442.267,00	47.125.753.799,00	-2.501.688.468,00	94,96
5.5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.470.956.967,00	47.047.549.299,00	-2.423.407.668,00	95,1
5.5.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.079.500,00	27.445.000,00	-24.634.500,00	52,7
5.5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.914.800,00	29.289.500,00	-23.625.300,00	55,35
5.5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.491.000,00	21.470.000,00	-30.021.000,00	41,7
5.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.251.087.300,00	5.785.780.235,00	-465.307.065,00	92,56
5.5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.084.100,00	28.394.111,00	-1.689.989,00	94,38
5.5.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.566.200,00	654.659.295,00	-46.906.905,00	93,31
5.5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.196.800,00	37.340.998,00	-2.855.802,00	92,9
5.5.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.854.000,00	445.775.850,00	-156.078.150,00	74,07
5.5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.114.200,00	26.182.680,00	-10.931.520,00	70,55
5.5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	4.680.000,00	-2.712.000,00	63,31
5.5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.832.880.000,00	4.588.747.301,00	-244.132.699,00	94,95
5.5.02.04.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	249.940.000,00	159.632.000,00	-90.308.000,00	63,87
5.5.02.04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	69.165.000,00	53.846.100,00	-15.318.900,00	77,85
5.5.02.04.2.01.007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	732.750.000,00	722.900.000,00	-9.850.000,00	98,66
5.5.02.04.2.01.011	Penagihan Pajak Daerah	795.170.000,00	543.710.000,00	-251.460.000,00	68,38
5.5.02.04.2.01.013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	209.597.200,00	89.391.635,00	-120.205.565,00	42,65
5.5.02.04.2.01.014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	95.000.000,00	95.000.000,00	0	100



Sasaran strategis mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan sasaran belanja sebagaimana tercantum dalam DPA Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusun DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau



Bangunan Lainnya

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintahan Kabupaten/ Kota
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan



Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga(PFK)

- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Koordinasi ,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/kota.

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

e. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah



- Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Penilaian Barang Milik Daerah
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota
- f. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
 - Analisa dan Pengembangan Pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun baik dari segi anggaran maupun pendapatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun Rakyat Harus Sejahtera.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dan capaiannya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan/ dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2026 yaitu terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat dengan sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparansi.

Sedangkan kebijakan yang ditentukan untuk mencapai sasaran dengan melaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan daerah
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan wajib pajak daerah;



3. Mengoptimalkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pelayanan prima pengelolaan keuangan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah (pajak daerah);

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program sebagai berikut :

1. Terbatasnya aparatur yang ada sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan;
2. Kapabilitas sumber daya aparatur yang masih terbatas;
3. Sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang;
4. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Perpajakan Daerah;

Strategi pemecahan masalah/langkah-langkah yang telah dilaksanakan:

1. Optimalisasi kebutuhan aparatur guna menunjang kebutuhan organisasi;
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
4. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD pajak daerah;

Langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan jumlah ASN yang sesuai dengan Tingkat pendidikan.
2. Peningkatan Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun selama tahun 2023, sehingga beberapa program/ kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara lebih efisien. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2023 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana- rencana kerja berikutnya, yaitu

1. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala
2. Melakukan koordinasi internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun maupun koordinasi eksternal dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan;
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan;
4. Mewujudkan adanya aparat yang profesional, dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis;
5. Meningkatkan pengembangan basis data potensi-potensi pendapatan, karena dengan data actual dan akurat maka pengambilan kebijakan maupun penyusunan peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, maka akan sangat penting dan bermanfaat apabila pengembangan basis data tersebut mulai dirintis secara terkomputerisasi.



Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by 'Novendy Saragih'.

**FRANS NOVENDY SARAGIH, S.STP,M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 198111012000121001**



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
INSPEKTORAT DAERAH

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pamatang Raya, 27 Maret 2024



INSPEKTUR,
ROGANDA SIHOMBING, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741202 199503 1 001